

Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Siswa

Anggita Muliani^{a,1*}, Roni Rustandi

^{a,mahasiswa}Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^{b,dosen}Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹mulianianggita12@gmail.com ; ²dosen02176@unpam.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 11-03-2023, direvisi: 18-03-2023, disetujui: 30-03-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi nilai-nilai toleransi dalam mata pelajaran PPKn, serta mengetahui factor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai toleransi dalam mata pelajaran PPKn. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, *display*, dan *selective coding*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam mata pelajaran PPKn dengan baik. Adanya factor pendukung berupa kegiatan pembelajaran yang demokratis dan program sekolah yang objektif. Namun terdapat pula factor penghambat implementasi nilai-nilai toleransi berupa sikap pasif atau cuek, dan adanya latar belakang peserta didik yang beraneka ragam. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa program sekolah dan kegiatan pembelajaran berusaha meminimalisir perilaku pasif atau cuek dengan berupaya meningkatkan kesadaran tanah air.

Kata-kata kunci: Implementasi; Toleransi; PPKn

Abstract

This study aims to determine the implementation of tolerance values in Civics subjects, as well as to determine the factors supporting and inhibiting the implementation of tolerance values in Civics subjects. The research method uses a qualitative approach with descriptive methods through data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is through data reduction, display, and selective coding. The results of this study indicate that students have implemented tolerance values in Civics subjects well. There are supporting factors in the form of democratic learning activities and objective school programs. However, there are also factors that inhibit the implementation of tolerance values in the form of a passive or indifferent attitude, and the diverse backgrounds of students. The conclusion in this study is that school programs and learning activities try to minimize passive or indifferent behavior by trying to increase awareness for the homeland.

Keywords: Implementation; Tolerance; Civic Education

Pendahuluan

Negara-negara di berbagai belahan dunia memiliki keindahan dan keanekaragamannya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara dengan posisi persimpangan, Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional dan persinggahan kapal-kapal dari berbagai negara. Dalam hal ini, Indonesia tercatat sebagai bangsa dengan berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Sebagaimana pendapat (Muntaha & Wekke, 2017, hlm. 17) mengatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku dan etnis yang tersebar di berbagai pulau. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, persebaran suku bangsa didominasi suku Jawa sebagai suku bangsa terbesar di Indonesia dengan persentase 41% dari total penduduk. Keragaman tersebut terjalin, bangsa Indonesia mampu mengekspresikan berbagai macam suku yang tersebar di 17.000 pulau. Menurut (Widiyanto, 2017, hlm. 28), kondisi Indonesia yang majemuk merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas kekuasaan dan kasih sayangnya yang harus

dijaga oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk konsekuensi dan tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut ditunjukkan melalui pandangan hidup yang mengakui dan menerima keberagaman sebagai bentuk pluralisme dan bahwa keberagaman merupakan keniscayaan bangsa yang keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penelitian yang relevan untuk mendukung masalah dan urgensi penelitian. Di latar belakang masalah juga ditambahkan teori ilmiah yang terintegrasi di latar belakang masalah.

Menurut (Yuliani et al., 2021, hlm. 60) Dinamika dan dialektika kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk ini tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta UUD 1945. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia dapat melestarikan konsep keragaman suku, ras, agama, budaya dan

bahasa, salah satunya melalui bidang pendidikan. Disadari oleh masyarakat bahwa pendidikan merupakan bidang penting yang memerlukan usaha untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Begitu pula dengan bangsa Indonesia tentunya menaruh harapan yang tinggi terhadap bidang pendidikan, sebagai wujud pelaksanaan kekuatan pembangunan negara. Karena pendidikan merupakan jembatan emas untuk membentuk tunas-tunas muda harapan bagi bangsa yang berkualitas dan berkarakter.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 yang berbunyi : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya dan kebhinekaan bangsa. Berdasarkan kenyataan tersebut maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus demokratis dan adil serta tidak diskriminatif dalam memperlakukan peserta didik, pendidik dan lembaga. Semua unsur pendidikan harus saling menghormati, menghargai, dan saling

menyayangi dengan sikap toleran tanpa terkecuali. Namun, keberagaman seringkali menimbulkan polemik yang memanas, dipertajam oleh pandangan dan ambisi beberapa pihak. Seperti halnya kasus intoleransi tahun 2017-2021 yang dihimpun dari situs [hashtag.id](https://www.hashtag.id), di lingkungan sekolah terdapat beberapa kasus intoleransi yang cenderung bermotif agama. Bahkan, keadaan ini juga didukung oleh data penelitian KPAI dengan rentang tahun 2016-2020 dimana terdapat anak korban dan pelaku kekerasan di sekolah (bullying), anak korban dan pelaku tawuran pelajar, serta anak korban kebijakan seperti (anak dikeluarkan karena hamil, pemerasan di sekolah, tidak boleh mengikuti ujian, putus sekolah, putus sekolah, dll) sebanyak 3.194 orang. Hal ini disebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam tatanan kehidupan masyarakat dan mudarnya nilai-nilai budaya yang ada (Setiawati & Sulastri, 2020, hlm. 79). Salah satu cara untuk menghalau maraknya kasus intoleransi dan sikap pasif dalam berinteraksi dapat dilakukan dengan

menerapkan nilai-nilai toleransi. Pengertian Implementasi menurut (Ulfa et al., n.d., p. 163) bahwa implementasi diarahkan pada tindakan kegiatan, tindakan, atau mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, lebih dari itu kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu menurut (Rosad, 2019, p. 176), pengertian implementasi sebagai bentuk perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah rangkaian proses yang dinamis, implementasi konsep dan penerapan ide dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tujuan yang telah ditetapkan memiliki ukuran yang disepakati yaitu suatu nilai. Menurut Nugrahastutik (2016, hlm. 266–267), Nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap sesuai, pantas, patut dan baik yang keberadaannya diharapkan, dicita-citakan,

diinginkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan bersama. kehidupan dalam kelompok masyarakat, dari unit unit sosial terkecil. kepada suku-suku, bangsa-bangsa dan masyarakat internasional. Dijelaskan pula oleh Toriqularif (2017, hlm. 6), nilai adalah realitas yang valid sebagai cita-cita yang benar dan berlawanan. Nilai bersifat praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta dilembagakan secara objektif dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa nilai adalah ukuran baik atau buruk yang berkaitan dengan penalaran rasional dan keyakinan yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menentukan aspek kognisi, emosi, dan perilaku serta menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Ukuran ini menentukan suatu sikap dan sifat yang ada dalam masyarakat yaitu toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 1477-1478), Toleransi berasal dari kata “toleran” yang artinya toleran (menghargai, membolehkan, membolehkan),

pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pandangannya).

Menurut Firda (2021, hlm. 87), Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu *tolerantia* yang berarti kelonggaran, kelembutan, ringan dan sabar yang mengacu pada sikap keterbukaan, lapang dan suka rela. Secara umum (Amir, 2018, hlm. 55), istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, luwes, sukarela dan lemah lembut. Ada dua interpretasi penggunaan toleransi. Pertama, interpretasi negatif yang menyatakan bahwa toleransi hanya mensyaratkan sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Kedua, interpretasi bersifat positif yaitu dengan mengatakan bahwa toleransi bukan sekedar membiarkan tetapi adanya dukungan terhadap orang atau kelompok lain.

Berdasarkan konsep tersebut, maka (Mokodenseho & Wekke, 2017, hlm. 68), toleransi meliputi beberapa aspek, yaitu 1) aspek perdamaian, 2) aspek menghargai perbedaan dan individu, 3) aspek kesadaran. Individu yang

toleran adalah membiarkan atau mengizinkan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri, menghargai orang lain, menghargai asal usul dan latar belakangnya. Jadi hakikat toleransi adalah usaha, usaha, dan sikap menerima, menghargai, menghormati, dan mengakui perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Maya (2016, hlm. 3), terdapat faktor pendukung nilai-nilai toleransi yaitu: 1) kebijakan dinas pendidikan dan kepala sekolah, 2) pedoman kurikulum, 3) sumber daya manusia yang secara keseluruhan berpartisipasi aktif, 4) fasilitas dan infrastruktur, 5) lingkungan, 6) kebersamaan warga sekolah, 7) komitmen sekolah, 8) kegiatan ekstrakurikuler. Namun juga dikatakan oleh Maya (2016, hlm. 3), ada juga faktor penghambat proses nilai toleransi yaitu: 1) latar belakang siswa yang beragam, 2) kesadaran diri yang rendah, 3) kepasifan atau ketidakpedulian, 4) pengaruh teman sebaya .

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan merupakan kekuatan yang ampuh untuk mengimplementasikan nilai-nilai toleransi bagi

penerus bangsa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang pendidikan No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 yaitu: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Nasional, 1982, hlm. 1). Mata pelajaran yang nilai-nilainya mampu membentuk masyarakat sesuai dengan karakter bangsa dan negara adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menitikberatkan pada bidang pembentukan warga negara sebagai generasi penerus bangsa yang mampu melaksanakan hak

dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. mempunyai tugas membentuk pendidikan karakter, nilai dan moral Pancasila, mengembangkan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan falsafah Bhinneka Tunggal Ika (Baehaqi, 2020, hlm. 157). Menurut Fatolosa (2019, hlm. 15), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan yang secara substantif dan pedagogis dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Terkait dengan karakter kewarganegaraan, menurut Haryati dan Khoiriyah (2017, hlm. 4) menyatakan penguatan nilai-nilai karakter yang meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Pada muatan mata pelajaran yang memuat nilai-nilai pencegahan kasus intoleransi yang marak terjadi, kasus perundungan, bahkan adanya sikap pasif dan apatis. Masih banyak siswa di luar sana yang

bersikap cuek ketika teman lain sedang berbicara atau presentasi, dan mengolok-olok kekurangan orang lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bullying atau cuek kepada guru dan staf di sekolah. Keadaan ini diperparah dengan proses pelaksanaan pembelajaran siswa yang sebagian besar tidak merespon pertanyaan guru. Perilaku toleransi pasif berbahaya dan merugikan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga pendidikan kebhinnekaan dan toleransi bertumpu pada sekolah dan kelas sebagai bentuk pembelajaran tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran wajib tersebut merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan akhlak dan karakter yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai tersebut dipupuk dan ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan karena dengan demikian siswa dapat hidup berdampingan sejak dini di tengah keberagaman yang ada. Peserta didik memahami sikap saling menghargai dan menghargai antar sesama serta membangun perilaku positif terhadap

keberagaman suku, etnis, ras, budaya dan agama. Penanaman nilai-nilai tersebut merupakan komponen penting untuk menjamin persatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia (Yulianti, 2021, hlm. 62).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP PGRI 35 Serpong. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: data primer merupakan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, guru PKn, dan siswa. Penelitian ini didukung oleh sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber bacaan, baik

berupa buku, foto, publikasi jurnal atau karya ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah SMP PGRI 35 Serpong, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan kondisi siswa yang cukup religius dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dengan mengubah hasil wawancara menjadi naskah verbatim, display, dan selektif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat tiga hal pokok penelitian ini yaitu implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran PKn di SMP dilakukan secara dinamis dalam

temuan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik.

Implementasi nilai-nilai toleransi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini didukung oleh ketersediaan guru linier yang terpenuhi dengan baik oleh sekolah, dengan kesesuaian bidang yang diajarkan, guru memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola pembelajaran. Guru juga selalu menyiapkan perangkat administrasi pembelajaran secara rutin. Seperti yang diungkapkan Darmadi (2015:165) bahwa guru harus mampu mengerjakan urusan administrasi sekolah seperti membuat administrasi perlengkapan sekolah.

Selain itu, ditemukan pula implementasi penerapan nilai-nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan diawali dengan kegiatan melantunkan doa-doa sesuai dengan keyakinan agama yang dianut. Menandakan bahwa siswa

dan guru meyakini kepercayaannya masing-masing dan menghormati perbedaan agama yang ada di sekitarnya. Guru melakukan absensi siswa dan menanyakan kondisi siswa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Siswa dan guru juga menyanyikan lagu nasional dan daerah sebelum membahas materi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa memiliki wawasan yang luas tentang keragaman lagu yang ada di Indonesia dan meningkatkan semangat belajar. Guru berusaha mengaitkan fenomena sosial dan isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan materi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar mahasiswa peduli dan tidak lalai dengan kondisi masyarakat yang kompleks. Guru melibatkan keaktifan siswa, dengan cara membagi mereka menjadi beberapa kelompok kecil dimana mereka selalu bekerjasama satu sama lain dalam menyelesaikan tugas yang akan dipresentasikan di depan kelas. Guru selalu menanggapi dengan kata-kata yang sopan dan santun. Hal ini terlihat dari hasil penilaian belajar siswa yang objektif dan tidak pilih kasih.

Siswa juga saling membantu ketika kesulitan dan hambatan dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hasil penelitian juga menemukan bahwa faktor pendukung implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP PGRI 35 Serpong selalu mengadakan program bakti sosial setiap satu tahun sekali yaitu ditunjukkan kepada masyarakat sekitar dan siswa yang memiliki berbagai latar belakang kurang mampu. Bantuan umum yang diberikan berupa sembako atau kebutuhan sehari-hari, serta santunan. Situasi ini diberdayakan untuk meningkatkan toleransi dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, sekolah selalu mengadakan kerja bakti dua kali dalam setahun yang ditunjukkan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar mengajar. Melalui kegiatan ini, siswa dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler saat ini, siswa bebas mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler yang populer dan memiliki wawasan yang lebih luas.

Faktor penghambat penerapan nilai toleransi di SMP PGRI 35 Serpong adalah latar belakang siswa yang beragam yang berasal dari suku, ras, agama dan budaya yang berbeda. Mereka umumnya masih membawa identitas asal-usul yang beragam tersebut, kesadaran diri yang rendah juga menjadi faktor penghambat penerapan nilai-nilai pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terlihat pasif atau acuh tak acuh ketika ditanya oleh teman sebaya yang kurang dikenal. Hal ini didukung oleh pengaruh teman sebaya yang mengolahnya menjadi ajakan dan keputusan tanpa pertimbangan matang.

SMP PGRI 35 Serpong merupakan salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Menurut guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ibu Khairina Adzhani, “implementasi nilai toleransi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selama ini telah dilaksanakan

dengan baik. Contoh kecil ketika siswa masuk sekolah selalu menyapa siapa pun gurunya. piket
Jika di kelas siswa memahami bentuk kerjasama dalam kelompok kecil dengan teman sebayanya, biasanya mereka mendiskusikan kasus atau fenomena lingkungan”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fatolosa (2019, hlm. 115), memandang bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang memuat berbagai pengalaman belajar yang membantu membentuk totalitas warga negara sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab baik di sekolah, masyarakat, organisasi sosial. Dengan ini sekolah memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan yang baik dalam rangka membangun moral dan pengetahuan siswa. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Rika Fathurinna faktor pendukung implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatakan, “Beberapa faktor pendukung seperti: Selalu berdoa sesuai

dengan keyakinan agama masing-masing. Maka kami (guru) jangan memaksakan keyakinan agama kita. Dalam pembelajaran agama, sekolah memiliki guru sesuai dengan latar belakang agama siswa. (Ya, kalau Islam gurunya Islam. Kristen, Katolik, Budha, Khonghucu, gurunya sesuai). Ada adalah budaya 5 S (Senyum, Sapa, Sapa, Sopan, Santun) Sekolah selalu membuat program bakti sosial dan bakti sosial dimana kegiatan ini merupakan bantuan sosial kepada warga sekitar dengan melibatkan siswa". Menurut Maya (2016, hlm. 3), faktor-faktor pendukung implementasi nilai toleransi antara lain kebijakan sekolah, pedoman kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lingkungan, kebersamaan warga sekolah, komitmen sekolah, kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa aspek pendukung di SMP PGRI 35 Serpong telah membuat kebijakan dan memiliki komitmen sekolah yang baik seperti kegiatan bakti sosial dan pengabdian masyarakat. Sedangkan menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Rika Fathurinna

mengatakan faktor penghambat implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah "Secara umum pasti ada yang menghambat implementasi nilai toleransi di sekolah ya karena siswa yang bersekolah mayoritas beragama Islam, terkadang terjadi gesekan dengan beberapa temannya, karena cinta suku, agama, ras yang terlalu dibesar-besarkan.. Ada juga siswa yang cenderung pasif/kurang aktif Saya kurang peduli dengan sesama teman." Hal ini didukung oleh Saiful (2018, hlm. 55) mengatakan bahwa faktor penghambat implementasi nilai toleransi pada mata pelajaran PKn di sekolah antara lain latar belakang siswa yang beragam, rendahnya kesadaran diri akan pentingnya toleransi, sikap pasif atau acuh tak acuh. , dan pengaruh teman sebaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Nilai Toleransi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Siswa SMP PGRI 35

Serpong Tangerang Selatan telah dilaksanakan dengan baik. Diperkuat dengan adanya kebijakan sekolah yang tercermin dalam program sekolah seperti bakti sosial yang bersifat kemanusiaan dan bakti sosial yang sarat nilai toleransi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, setiap guru juga selalu menyiapkan perangkat administrasi pembelajaran yang tersusun dengan rapi, hal ini terlihat dari kelengkapan pengelolaan dan pengarsipan kelas masing-masing guru. Sekolah juga berkomitmen kuat untuk menyediakan guru secara linier agar penyerapan ilmu oleh siswa bisa maksimal.

Selain itu, setiap guru memiliki strategi pembelajaran yang kaya akan keterlibatan dan keaktifan siswa satu sama lain, sehingga mampu menghargai dan menghargai perbedaan yang ada.

Catatan Akhir (tidak harus ada)

Jika diperlukan, artikel dapat disertai dengan catatan akhir yang berisi catatan penting, keterangan simbol, atau ucapan terima kasih terhadap berbagai pihak atas bantuan dalam penelitian dan/atau penulisan

artikel. Panjang catatan akhir disesuaikan dengan kebutuhan.

Referensi

- Amir, S. & H. (2018). Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Pancasila. *Seminar Nasional Pendidikan Dasar, 1*, 52–62.
- Baehaqi, M. L. (2020). Cooperative Learning Sebagai Strategi Penanaman Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter, 10*(1), 157–174.
- Darmadi, H. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi, 13*(2), 161–174.
- Haryati, T., & Khoiriyah, N. (2017). Analisis Muatan Nilai Karakter Dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Smp Kelas Viii. *Jurnal Pendidikan Karakter, 7*(1), 1–9.
- Izazti, A. firda. (2021). Pentingnya Sikap Toleransi Dan Empat Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Baik (Good Citizenship) Di Masa Pandemi. *Jurnal Kalacakra. 02*, 85–90.
- Mokodenseho, S., & Wekke, I. S. (2017). Toleransi Beragama dan Pembelajaran

- Agama Islam. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 67–75.
- Muntaha, P. Z., & Wekke, I. S. (2017). Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman. *Intizar*, 23(1), 17.
- Nasional, U. S. P. (1982). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 71, 6–6.
- Nugrahastuti, E., Puspitaningtyas, E., Puspitasari, M., & Salimi, M. (2016). Nilai-Nilai Karakter pada Permainan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat*, 265–273.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173.
- Sari, Y. M. (2016). Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 15–26.
- Setiawati & Sulastri. (2020). Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 79.
- Telaumbanua, F. (2019). Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis E-Learning. *Telaumbanua, Fatolosa*, 62, 14–23.
- Toriqularif, M. (2017). Hakikat Dan Sistem Nilai Dalam Konteks Pendidikan (Sistem Nilai: Keluarga, Masyarakat, Kebudayaan dan Agama). *Journal Al Falah*, XVII(31), 37–56.
- Ulfa, Y. D., Ilham, L., & Haris, H. (n.d.). Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat. 160–170.
- Widiyanto, D. (2017). Penanaman Nilai Toleransi Dan Keragaman Melalui Strategi Pembelajaran Tematik Storybook Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 28–36.
- Yuliani, D., Nur, P., Nafisah, S., Dewi, D., & Furi, Y. (2021). Implementasi Nilai Karakter Toleransi Dalam Pembelajaran Pkn. 8(2), 143–152.

Yulianti. (2021). Penanaman Nilai Toleransi dan Keberagaman Suku Bangsa Siswa Sekolah Dasar melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 60–70.